

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.I. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis mengenai upaya-upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah dalam penyusunan pertanggungjawabannya, maka dapat dilihat upaya yang telah dilakukan dengan melihat kesiapan dari sarana prasarana yang dibutuhkan untuk setiap dinas. Kesiapan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dilihat dalam mempersiapkan sistem dan program tersebut dari sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan saat penerapannya yang bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu bekerjasama dengan BPKP DIY untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan dengan Puskom UGM untuk Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Sosialisasi SAP sudah pernah diadakan oleh BPKP DIY pada tahun 2005 yang bertempat di BKPD Pemerintah Kota Yogyakarta, sedangkan untuk pelatihan belum pernah diadakan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan sosialisasi Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada tanggal 4, 5 dan 6 September sebagai upaya menerapkan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pada tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta merencanakan akan menerapkan Permendagri No.

13 Tahun 2006. Sedangkan SAP untuk tahun 2007 belum dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

2. Masih banyak kendala-kendala yang dialami Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari sumber daya manusia yang masih terbatas baik jumlah maupun kemampuan, sarana prasarana yang belum memadai serta terbatasnya anggaran untuk penerapan SAP. Pemerintah Kota Yogyakarta masih kesulitan dalam menyesuaikan format dan isi laporan keuangan dengan SAP, karena mereka masih kesulitan dalam memahami SAP. Sarana prasarana seperti komputer masih terbatas untuk bagian keuangan serta anggaran yang disiapkan masih terbatas.

V.2. Saran

Ada beberapa usul dan saran yang diberikan penulis demi menunjang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penyesuaian antara latar belakang pendidikan dari pegawai dengan kelembagaannya. Sehingga untuk bagian keuangan lebih mudah memahami proses dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

2. Sosialisasi terhadap aturan atau kebijakan baru sebaiknya dilakukan untuk semua staf pada bagian yang bertanggungjawab di setiap dinas, agar dapat menciptakan koordinasi yang baik dan pemahaman yang menyeluruh bagi setiap pegawai.

3. Memperhatikan ketersediaan sarana prasarana seperti komputer dan sistem yang memadai untuk menunjang penyusunan laporan keuangan yang juga harus

diikuti dengan pelatihan terhadap suatu aturan/standar, sistem dan program yang baru agar setiap staf lebih mudah memahami dan mempraktekkan.





DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar; Muchlis; Iskandar, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Bastian, Indra; Soepriyanto, Gatot, *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintah Daerah*, Jakarta, Salemba Empat, 2003.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga, 2005.
- F.X. Yuwono, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 2 No. 2.
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat, 2002.
- Mangonting, Yenni, *Beberapa Teori Otonomi Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2002.
- Pristwanto, *Daerah Wajib Menyusun Laporan Keuangan*, Media Akuntansi No. 19/ Juli – Agustus.
- _____. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- _____. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. *Peraturan Walikota Nomor 149 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta*.

LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta
Lampiran 2	Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran 3	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar
Lampiran 4	Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Lampiran 5	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Lampiran 6	Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan
Lampiran 7	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan
Lampiran 8	Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial
Lampiran 9	Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya
Lampiran 10	Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Lampiran 11	Bagan Susunan Organisasi Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah
Lampiran 12	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan
Lampiran 13	Bagan Susunan Organisasi Dinas Perizinan
Lampiran 14	Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketertiban
Lampiran 15	Neraca
Lampiran 16	Laporan Realisasi Anggaran
Lampiran 17	Laporan Arus Kas
Lampiran 18	Surat Izin Penelitian

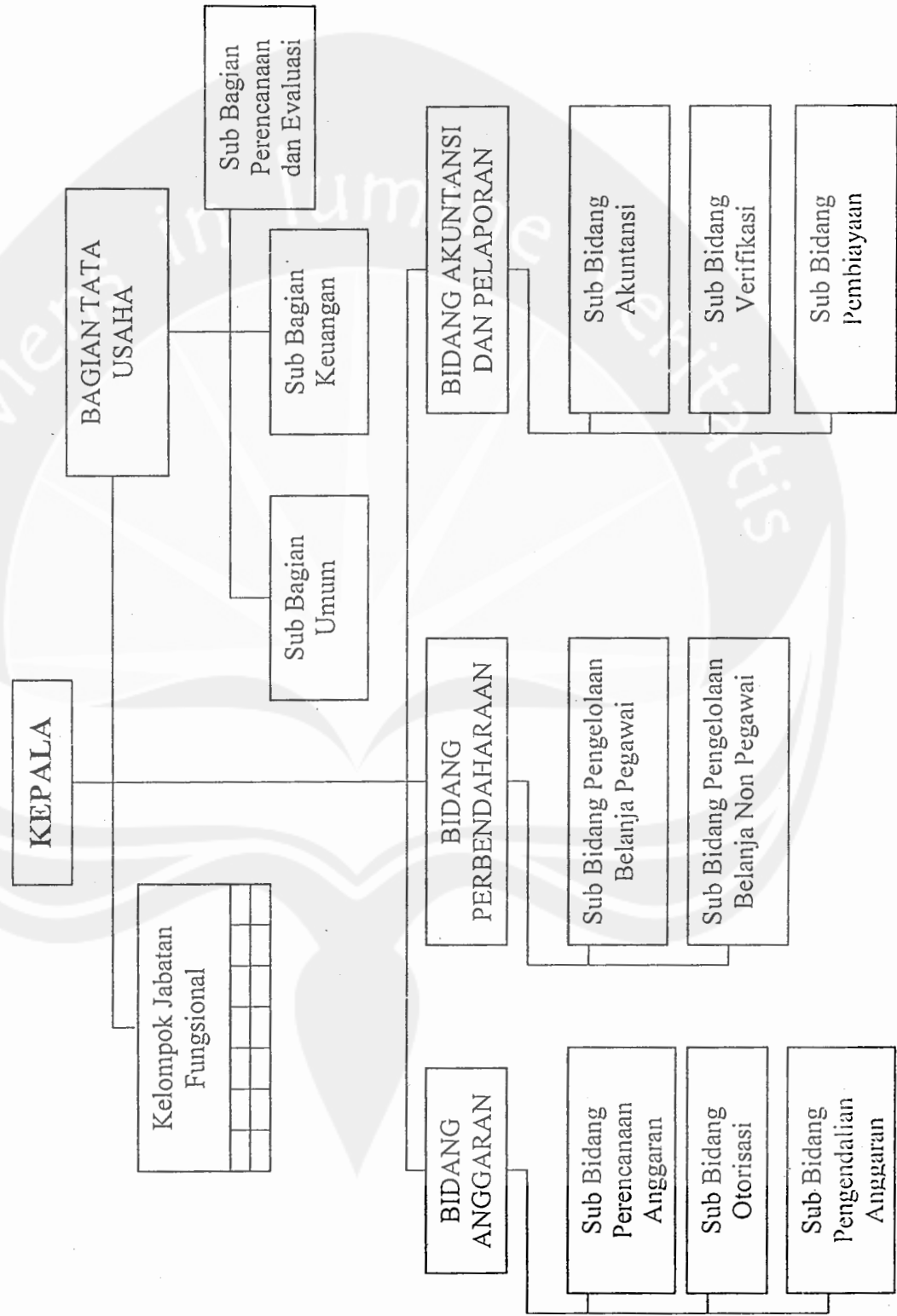
[illegible]

: garis hubungan kemitraan dan pertanggung jawaban Walikota kepada DPRD

- : garis komando
 : garis pertanggung jawaban kepada Walikota Yogyakarta
 : garis pembinaan teknis administratif
 : garis koordinasi

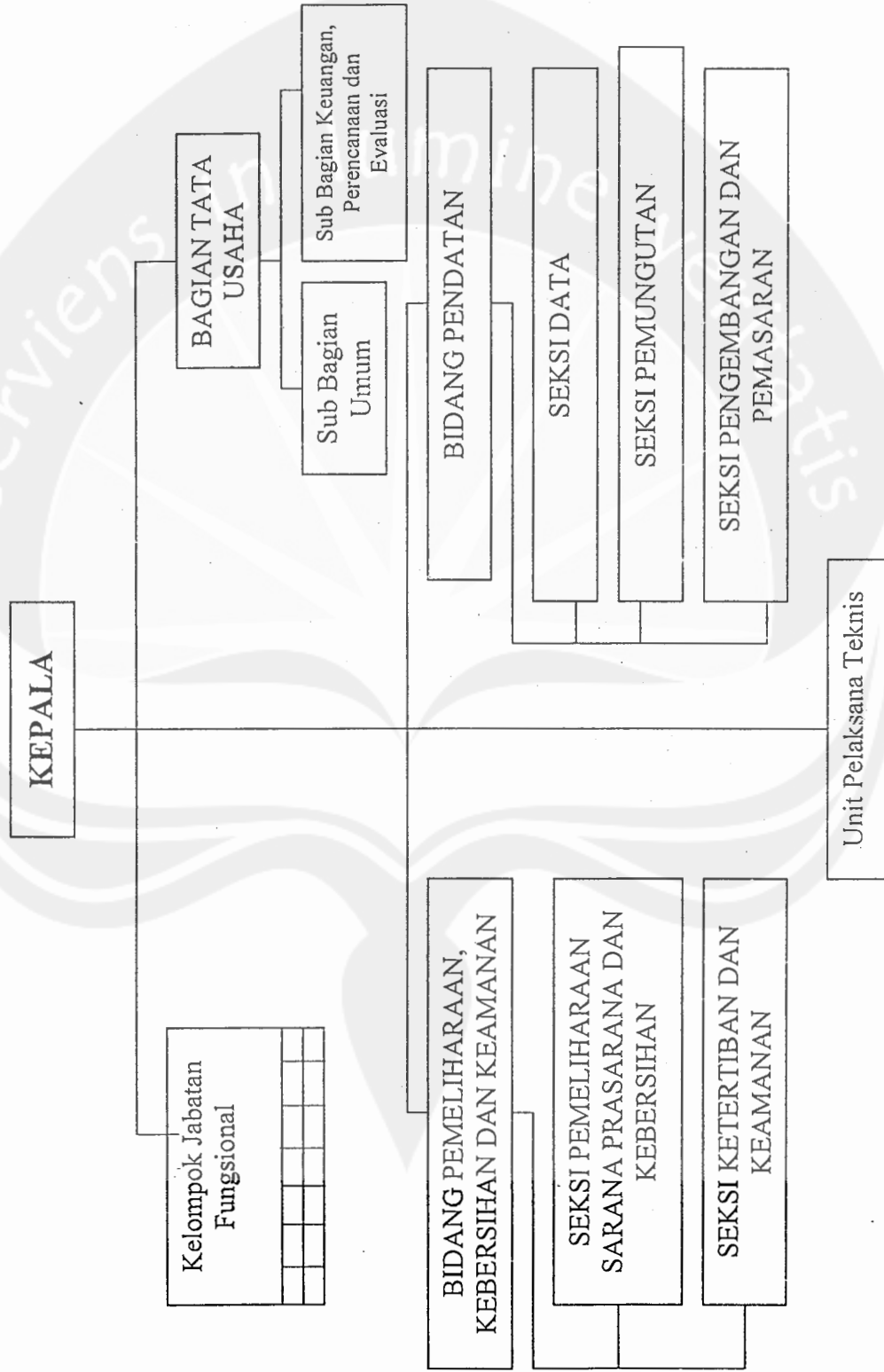
Sumber: Bagian Organisasi (2006)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

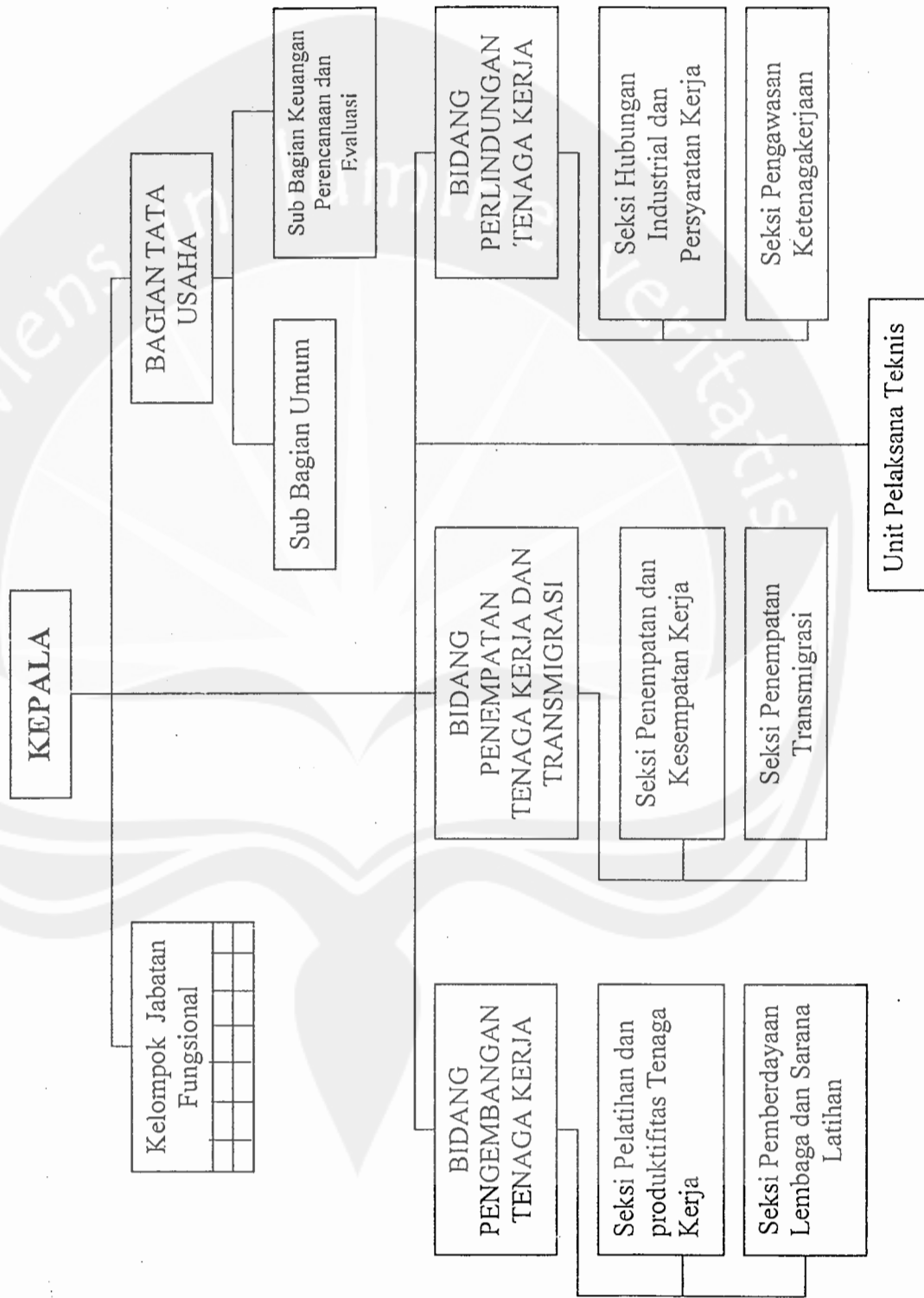


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (2006)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN PASAR

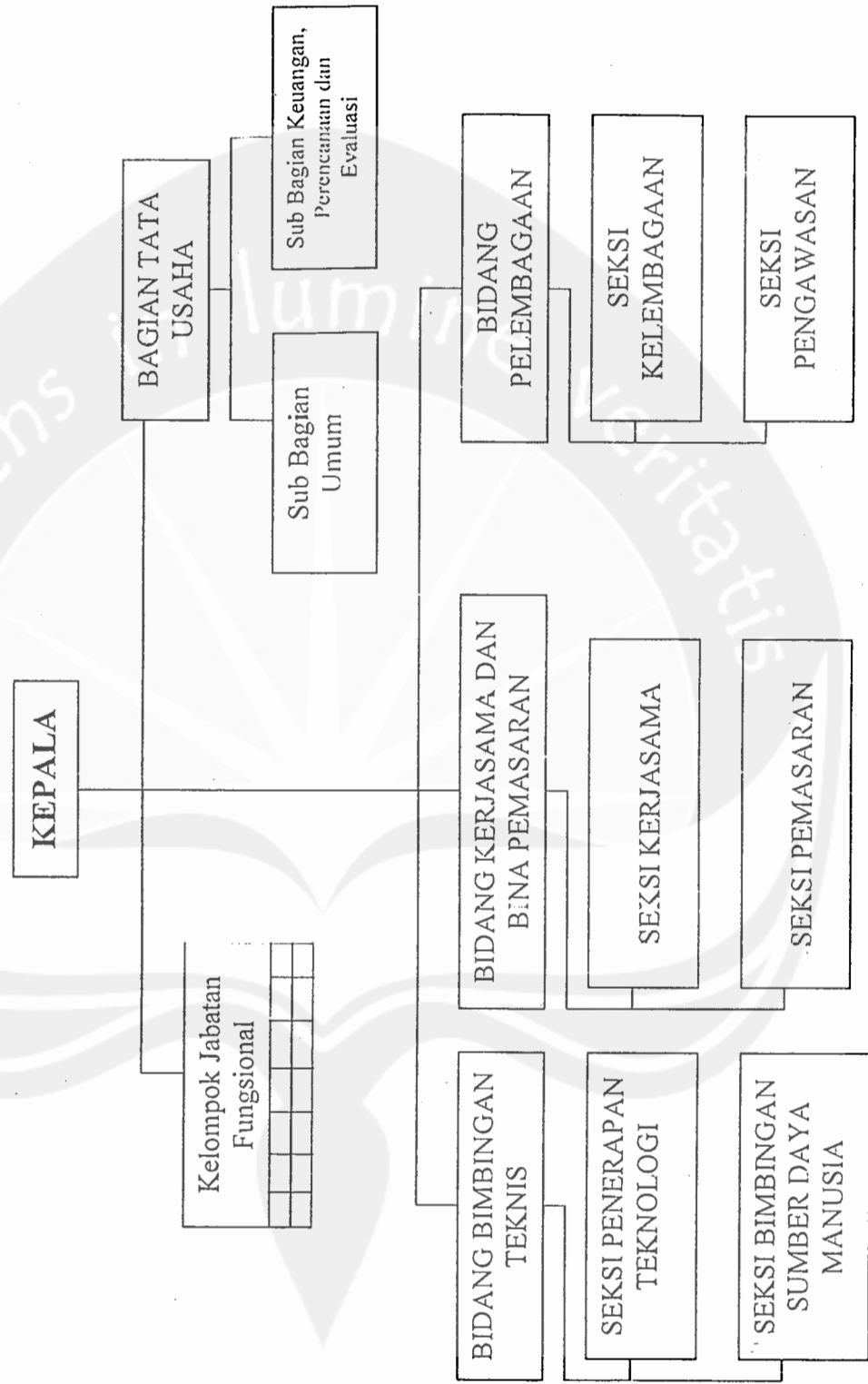


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



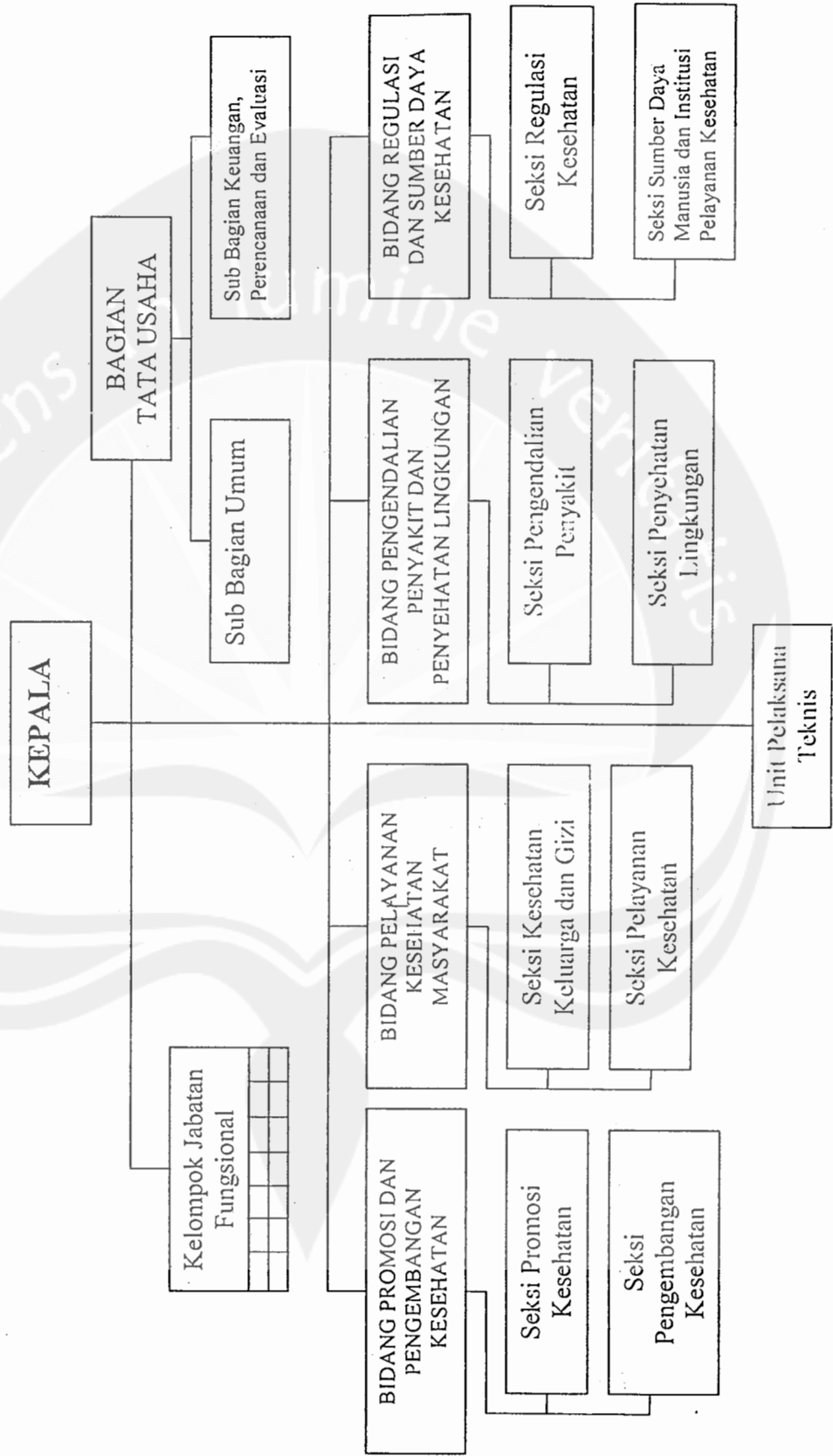
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (2006)

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

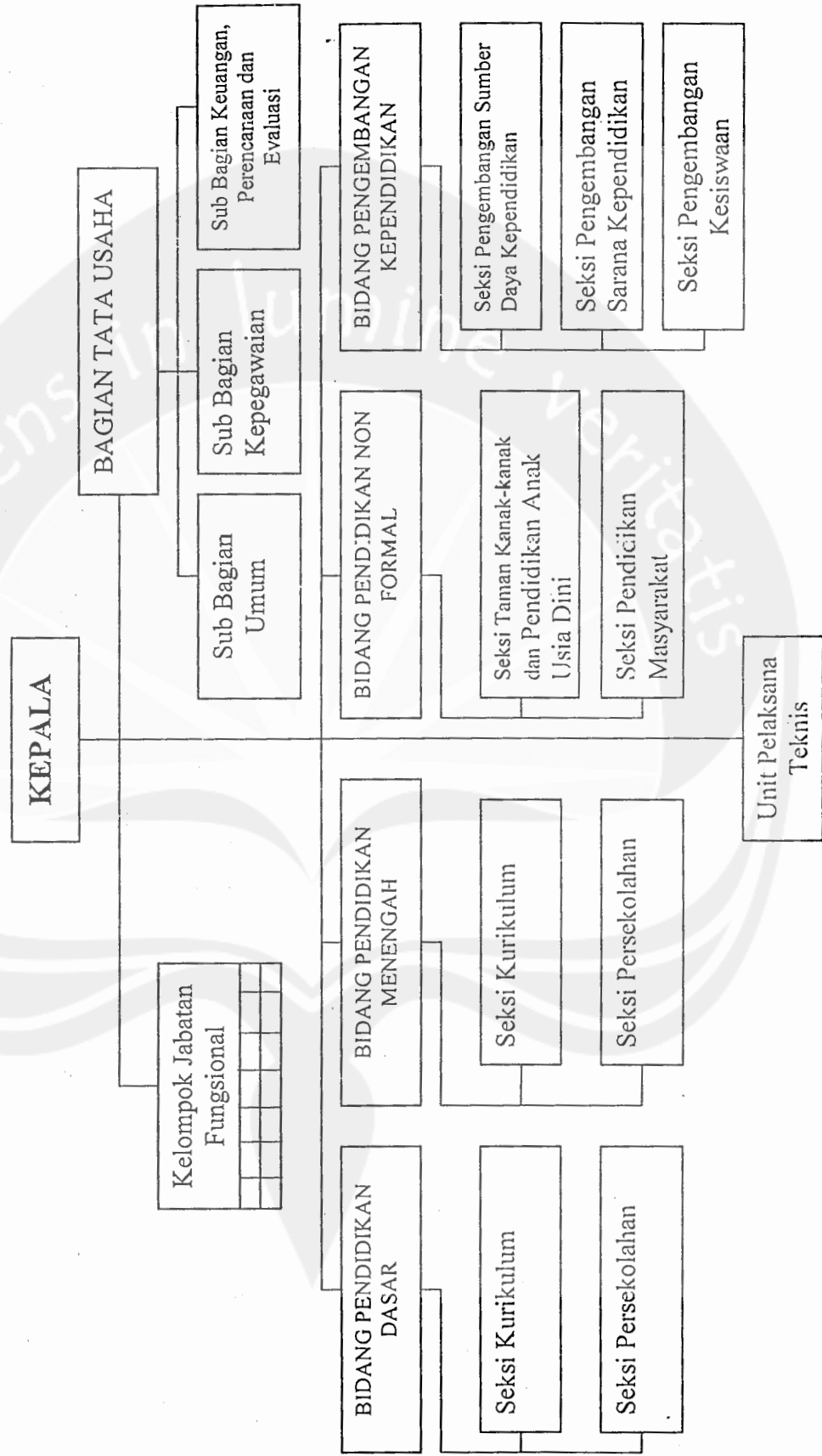


Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (2006)

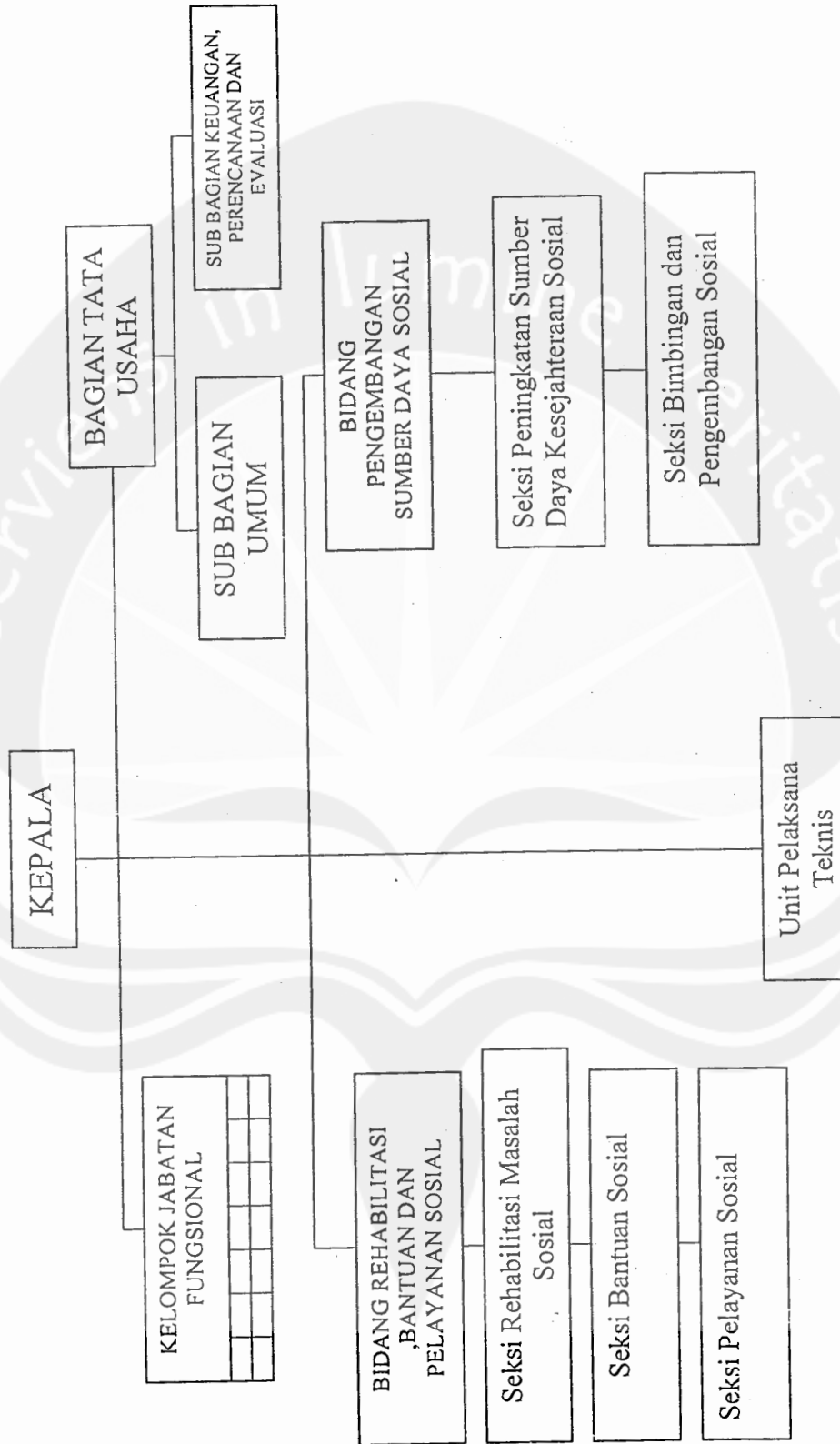
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



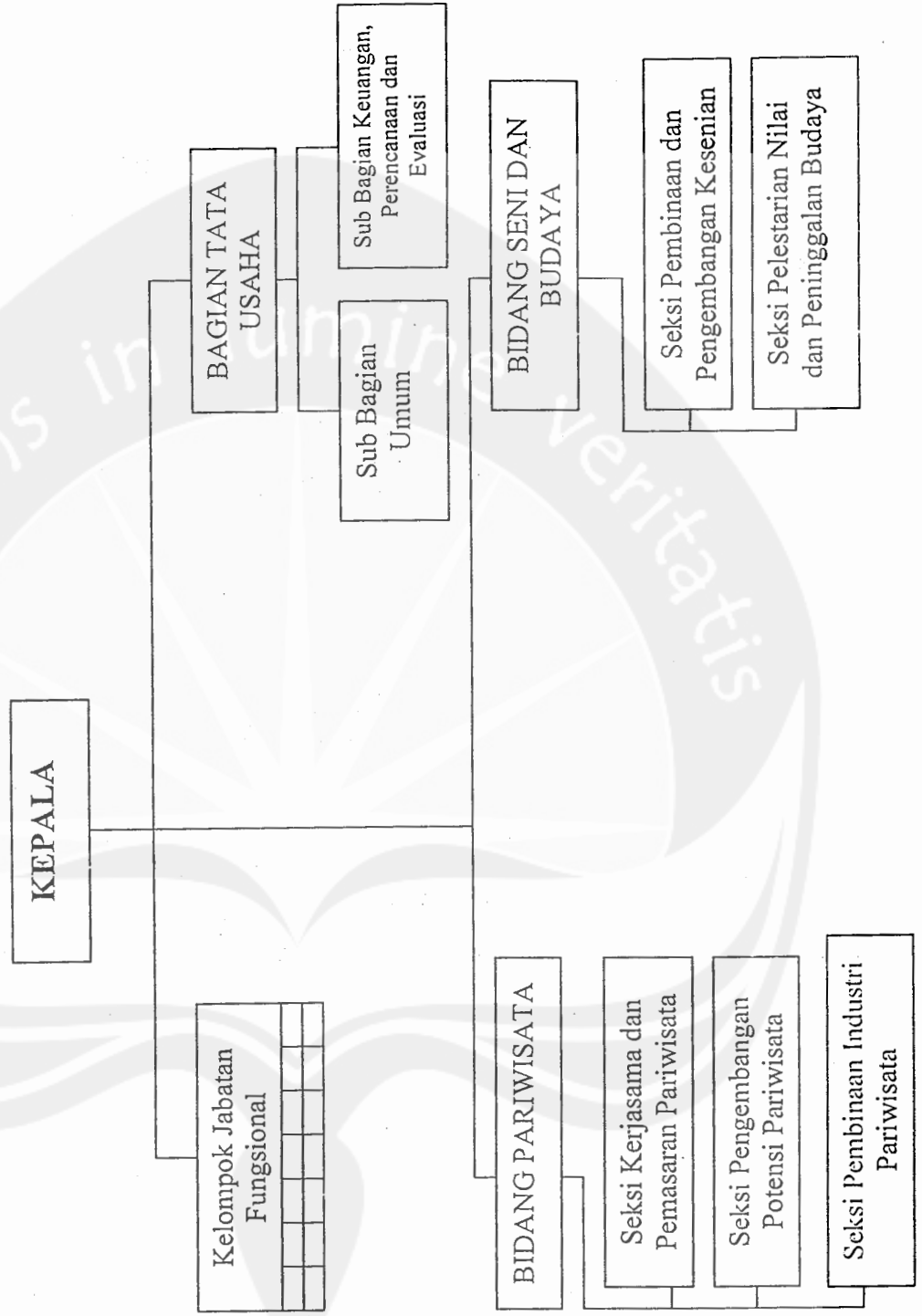
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN



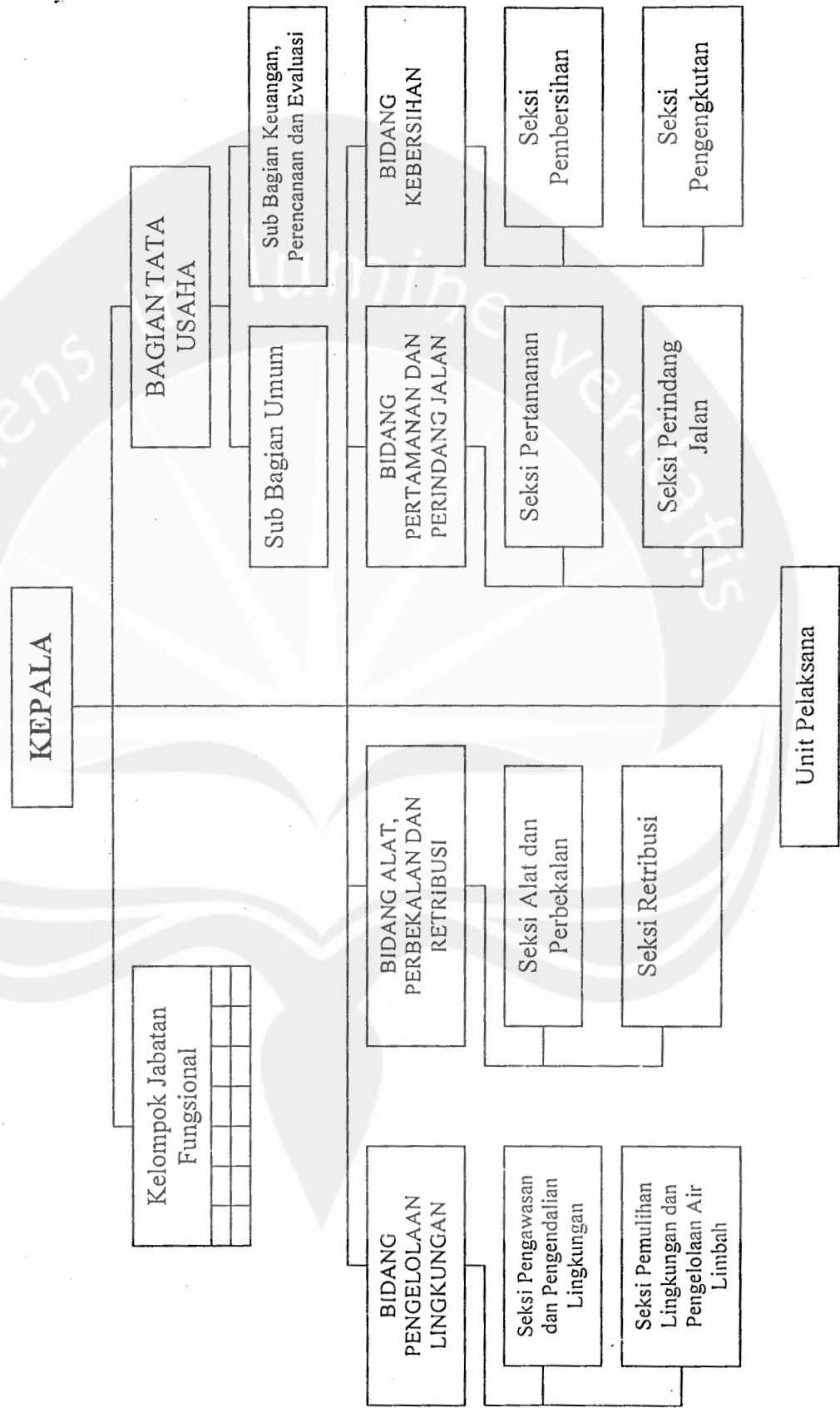
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL



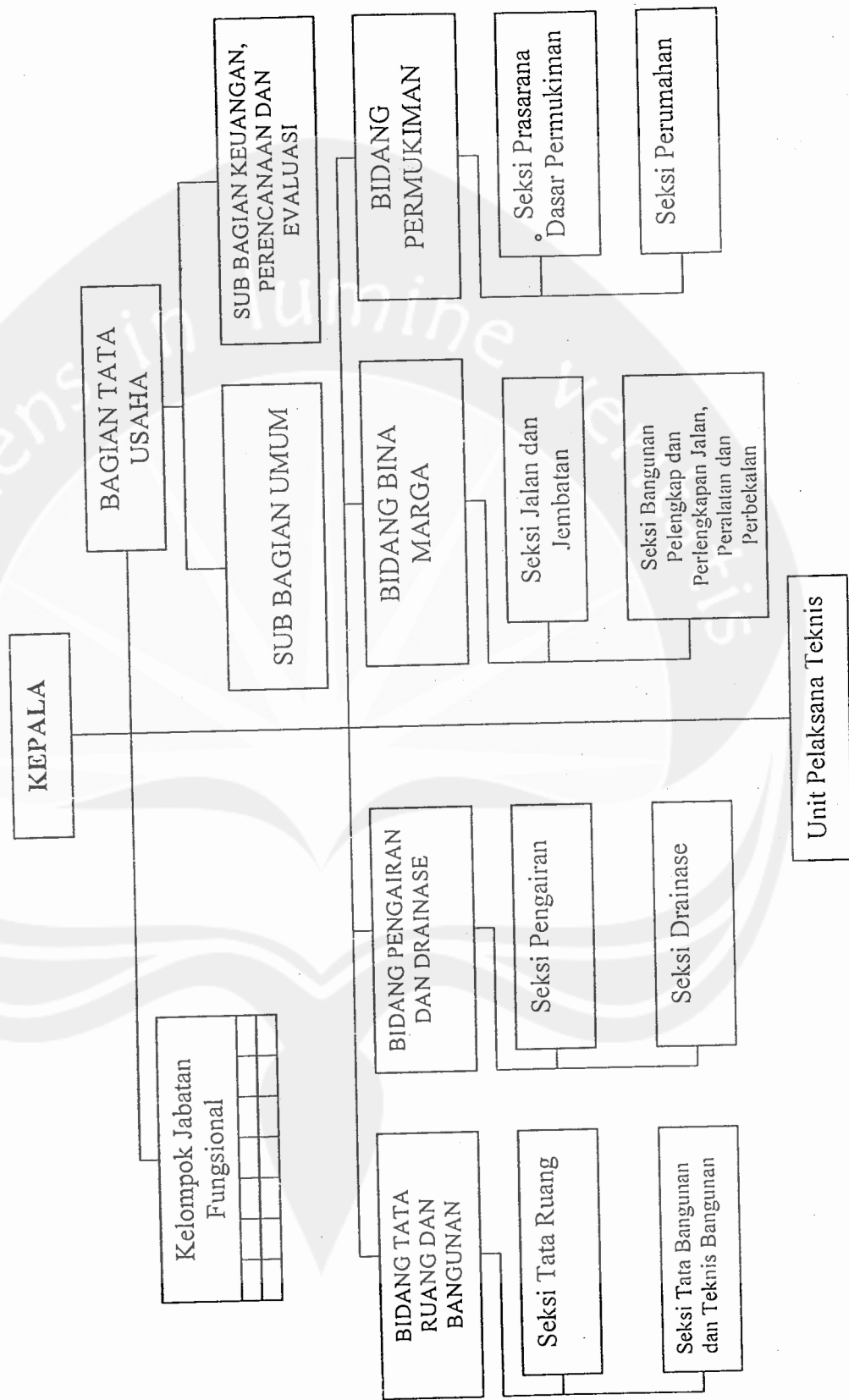
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA



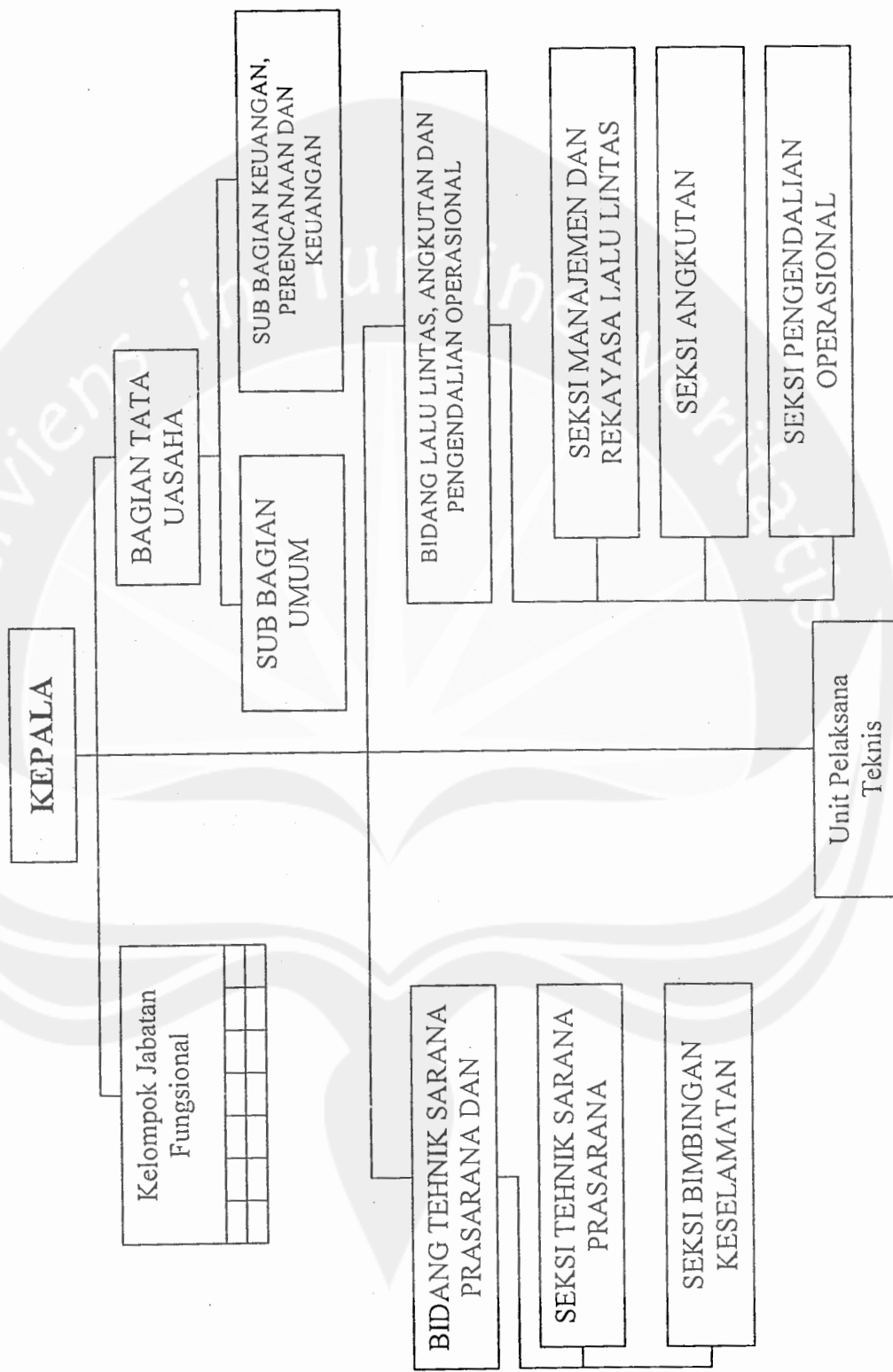
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



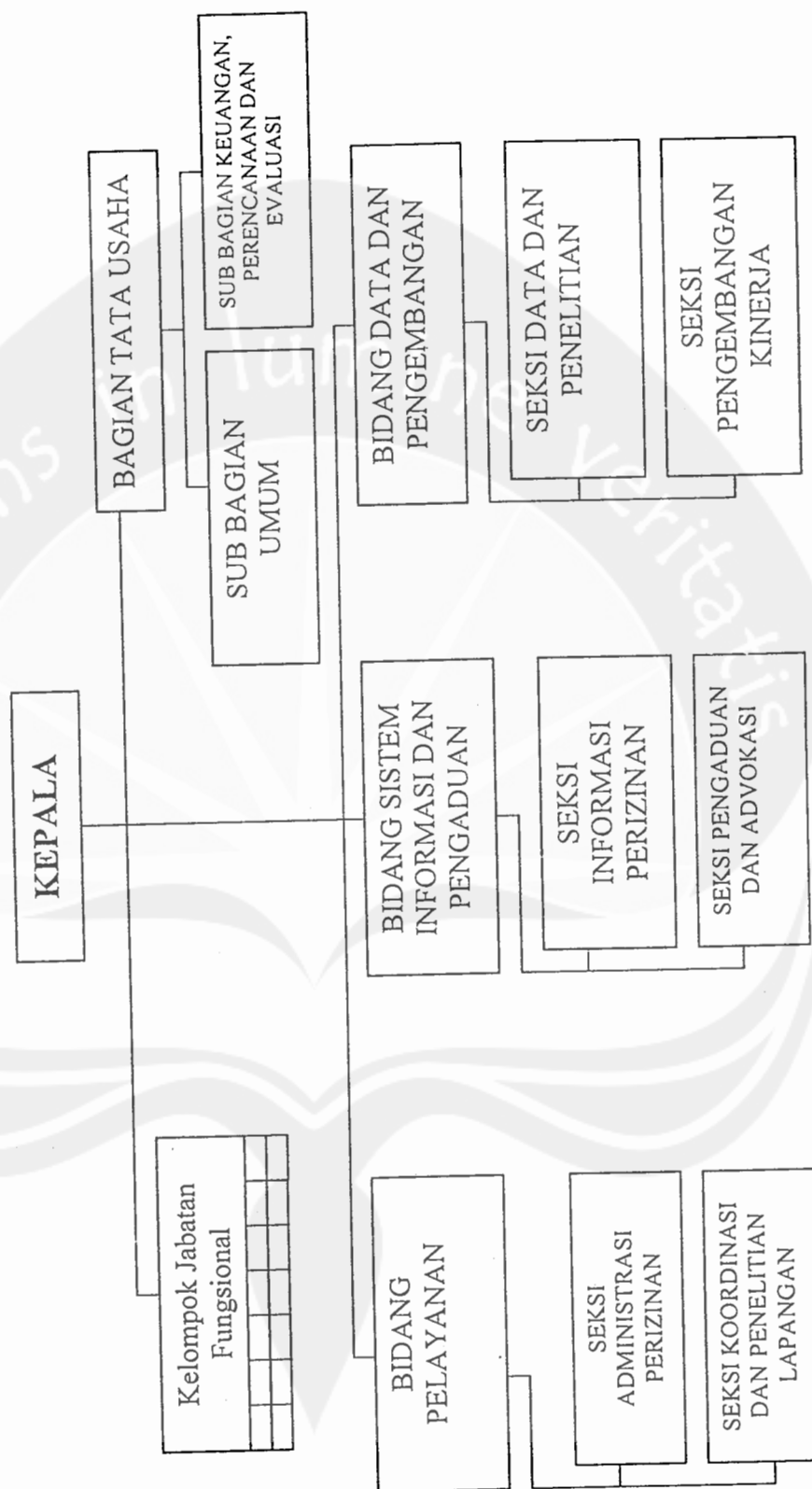
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH



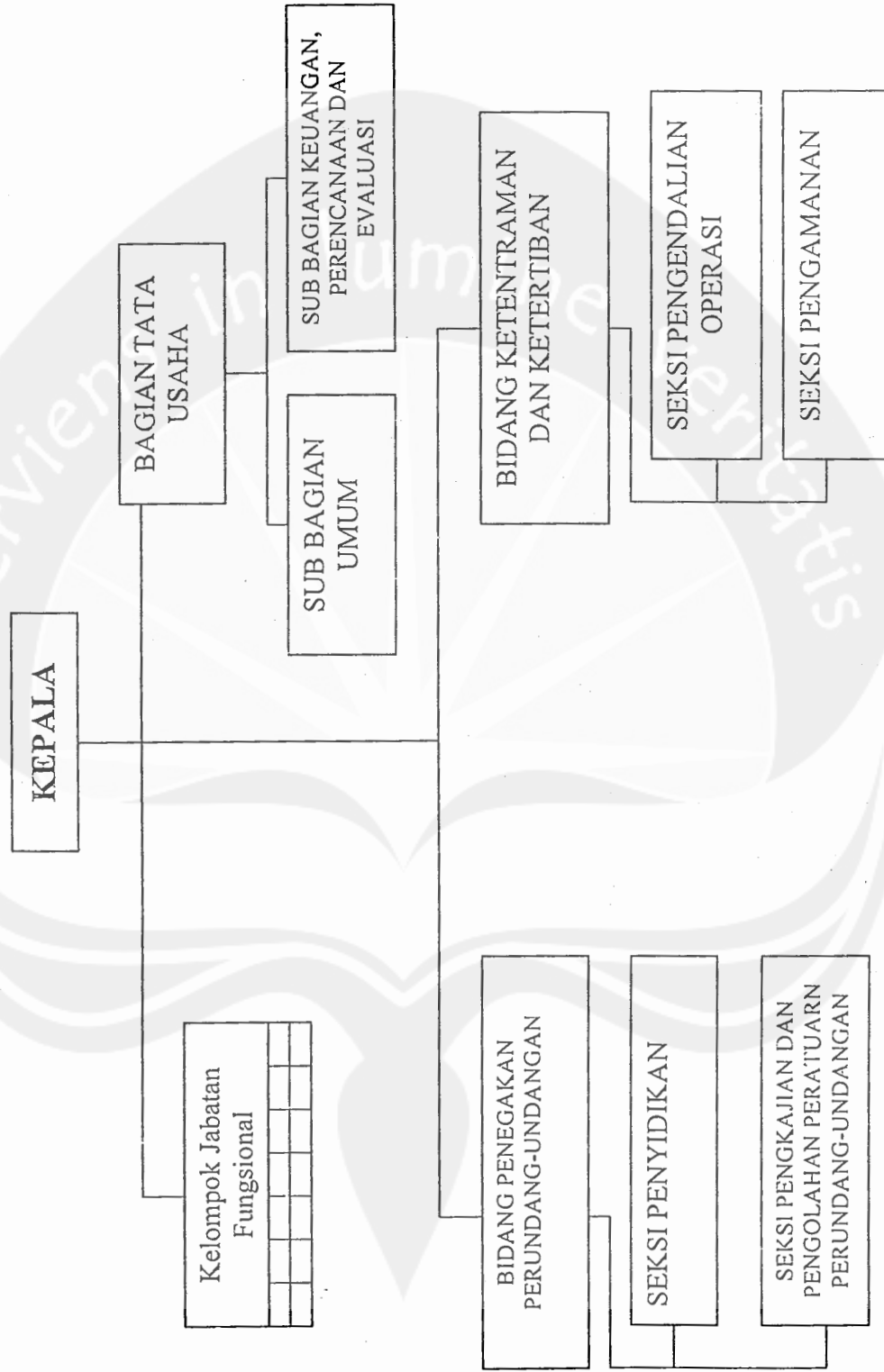
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIZINAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETERTIBAN



•
•
•
•

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR :
TANGGAL :

I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2005

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	PENDAPATAN			
1. 1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 84.335.352.000,00	Rp 89.196.416.784,70	105,76
1. 1 1	Pajak Daerah	Rp 43.365.000.000,00	Rp 46.106.723.374,00	106,32
1. 1 2	Retribusi Daerah	Rp 23.122.648.000,00	Rp 22.797.438.571,50	98,59
1. 1 3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp 6.651.516.000,00	Rp 6.651.534.800,72	100,00
1. 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp 11.196.188.000,00	Rp 13.640.720.038,48	121,83
1. 2	Dana Perimbangan	Rp 268.347.705.000,00	Rp 289.257.620.761,54	107,79
1. 2 1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 32.791.705.000,00	Rp 39.446.429.477,00	120,29
1. 2 2	Dana Alokasi Umum	Rp 201.231.000.000,00	Rp 201.231.000.000,00	100,00
1. 2 3	Dana Alokasi Khusus	Rp 6.600.000.000,00	Rp 6.600.000.000,00	100,00
1. 2 4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	Rp 27.725.000.000,00	Rp 41.980.191.284,54	151,42
1. 3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 15.543.000.000,00	Rp 13.432.864.500,00	86,42
1. 3 1 02.	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyeimbang dari Pemerintah	Rp -	Rp -	0,00
1. 3 1 03.	Dana penyesuaian Ad Hoc	Rp 11.943.000.000,00	Rp 11.943.000.000,00	100,00
1. 3 1 04.	Hibah	Rp 3.600.000.000,00	Rp 1.489.864.500,00	41,39
	JUMLAH PENDAPATAN:	Rp 368.226.057.000,00	Rp 391.886.902.046,24	106,43

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
II	BELANJA			
2.1	APARATUR DAERAH	Rp 70.775.136.313,00	Rp 64.390.925.069,82	90,98
2.1.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 31.216.908.010,00	Rp 28.980.600.331,82	92,84
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 26.218.096.337,00	Rp 24.350.880.564,30	92,88
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.231.814.453,00	Rp 3.058.801.526,52	94,65
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 854.373.000,00	Rp 801.593.680,00	93,82
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 912.624.220,00	Rp 769.324.541,00	84,30
2.1.2.	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp 23.553.179.103,00	Rp 20.844.064.912,00	88,50
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 6.577.330.250,00	Rp 5.951.909.400,00	90,49
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 14.315.903.453,00	Rp 12.634.703.372,00	88,26
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 2.161.673.000,00	Rp 1.841.455.690,00	85,19
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 498.272.400,00	Rp 415.996.450,00	83,49
2.1.3.	Belanja Modal	Rp 16.005.049.200,00	Rp 14.566.259.826,00	91,01
2.2.	PELAYANAN PUBLIK	Rp 379.874.870.591,00	Rp 334.853.680.300,63	88,15
2.2.1.	Belanja Administrasi Umum	Rp 206.850.889.421,00	Rp 188.968.325.856,00	91,35
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 182.842.291.930,00	Rp 168.033.445.090,00	91,90
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.367.006.461,00	Rp 13.742.583.438,00	83,97
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1.918.786.000,00	Rp 1.813.068.550,00	94,49
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 5.722.805.030,00	Rp 5.379.228.778,00	94,00
2.2.2.	Belanja Operasi & Pemeliharaan	Rp 46.963.795.025,00	Rp 43.301.882.300,00	92,20
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 9.031.819.490,00	Rp 8.479.043.400,00	93,88
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 23.977.871.135,00	Rp 22.051.546.267,00	91,97
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 4.771.235.000,00	Rp 4.212.346.690,00	88,29
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 9.182.869.400,00	Rp 8.558.945.943,00	93,21
2.2.3.	Belanja Modal	Rp 61.189.780.925,00	Rp 55.621.387.991,93	90,90
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 47.870.405.220,00	Rp 45.118.547.802,70	94,25
2.4	Belanja Tidak Tersangka	Rp 17.000.000.000,00	Rp 1.843.536.350,00	10,84
	JUMLAH BELANJA:	Rp 450.650.006.904,00	Rp 399.244.605.370,45	88,59
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	Rp (82.423.949.904,00)	Rp (7.357.703.324,21)	8,93

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
III	PEMBIAYAAN			
3 1	Penerimaan Daerah			
3 1 1 -	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 72.622.268.370,00	Rp 73.659.073.376,51	101,43
3 1 2 -	Transfer dari Dana Cadangan	Rp 19.036.041.445,00	Rp 19.036.041.445,00	100,00
3 1 3 -	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -	-
3 1 4 -	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	-
3 1 5 -	Hibah	Rp -	Rp -	-
	Jumlah Penerimaan Daerah	Rp 91.658.309.815,00	Rp 92.695.114.821,51	101,13
3 2	Pengeluaran Daerah			
3 2 1	Transfer Ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -	-
3 2 2	Penyertaan Modal	Rp 6.446.042.500,00	Rp 6.446.041.672,80	100,00
3 2 3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 1.032.600.000,00	Rp 1.032.398.926,35	99,98
3 2 4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2005	Rp 880.717.411,00	Rp 76.983.970.898,15	8.741,05
3 2 5	Pemberian Piutang Daerah	Rp 875.000.000,00	Rp 875.000.000,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Daerah	Rp 9.234.359.911,00	Rp 85.337.411.497,30	924,13
	Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)	Rp 82.423.949.904,00	Rp 7.357.703.324,21	Rp 8,93

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

CATATAN :

SILPA Tahun lalu terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 72.622.268.370,51
2. SILPA RSUD tahun 2004 sebesar Rp. 1.036.805.006,00

Rp. 73.659.073.376,51

SILPA Tahun 2005 terdiri dari :

1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2005 sebesar Rp. 75.604.476.512,15
2. SILPA RSUD tahun 2005 sebesar Rp. 1.379.494.386,00

Rp. 76.983.970.898,15

II
PERHITUNGAN KAS

I PENDAPATAN	Rp	391.886.902.046,24	
II BELANJA	Rp	399.244.605.370,45	
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp	(7.357.703.324,21)	

III PEMBIAYAAN			
- Penerimaan Daerah	Rp	92.695.114.821,51	
- Pengeluaran Daerah	Rp	8.353.440.599,15	
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp	84.341.674.222,36	
SILPA Tahun Anggaran 2005 :	Rp	76.983.970.898,15	

- Pengeluaran Daerah pada komponen Pembiayaan merupakan :		
- Jumlah Pembiayaan Pengeluaran Daerah	Rp	85.337.411.497,30
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Thn Berjalan	Rp	(76.983.970.898,15)
	Rp	8.353.440.599,15

PENCOCOKAN ANTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN SISA KAS

SILPA Tahun Anggaran 2005	Rp	75.604.476.512,15
Sisa Kas per tanggal 30 Desember 2005	Rp	73.399.493.719,15
Ditambah :		
Pembukuan-2 karena penyotoran sisa UUDP Tahun Dinas Perhitungan (antara 1 Januari s/d 31 Desember 2005) pada bulan berikutnya Tahun Dinas Perhitungan (antara 1 Januari s/d 10 Januari 2006)	Rp	2.204.982.793,00
Jumlah :	Rp	75.604.476.512,15

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2005 merupakan :		
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemkot Tahun Berjalan	Rp	75.604.476.512,15
- Sisa Lebih RSUD Tahun Berjalan	Rp	1.379.494.386,00
	Rp	76.983.970.898,15

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN ARUS KAS (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2005 DAN 2004

No	URAIAN	Per 31 Des 2005 (Rp)	Per 31 Des 2004 (Rp)
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
1	Arus Kas Masuk		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
	Pajak Daerah	46.106.723.374,00	40.581.980.256,00
	Retribusi Daerah	22.797.438.571,50	18.995.046.383,00
	Bagian Laba dari Usaha Daerah	6.651.534.800,72	5.285.786.650,47
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	13.640.720.038,48	15.048.605.811,35
	Total Pendapatan Asli Daerah	89.196.416.784,70	79.911.419.100,82
	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN DARI PEMERINTAH PUSAT		
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	39.446.429.477,00	37.889.440.614,00
	Dana Alokasi Umum	201.231.000.000,00	197.787.000.000,00
	Dana Alokasi Khusus	6.600.000.000,00	5.500.000.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	41.980.191.284,54	28.791.189.586,69
	Total Dana Perimbangan	289.257.620.761,54	269.967.630.200,69
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
	Bantuan Dana Kontijensi/Penyimbang dari Pemerintah	11.943.000.000,00	6.471.829.733,00
	Dana Penyesuaian Ad Hoc	1.489.864.500,00	13.299.000.000,00
	Total Lain-lain Pendapatan yang sah	13.432.864.500,00	19.770.829.733,00
	Total Arus Kas Masuk	391.886.902.046,24	369.649.879.034,51
2	Arus Kas Keluar		
	BELANJA APARATUR DAERAH		
	Belanja Administrasi Umum	28.980.600.331,82	29.273.749.713,29
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	20.844.064.912,00	18.633.614.620,00
	Jumlah Belanja Aparatur Daerah	49.824.665.243,82	47.907.364.333,29
	BELANJA PELAYANAN PUBLIK		
	Belanja Administrasi Umum	188.968.325.856,00	188.939.446.086,75
	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	43.301.882.300,00	36.817.724.255,00
	Sub Jumlah	232.270.208.156,00	225.757.170.341,75
	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	45.118.547.802,70	30.974.792.481,00
	Belanja Tidak Tersangka	1.843.536.350,00	4.996.667.725,00
	Jumlah Belanja Pelayanan Publik	279.232.292.308,70	261.728.630.547,75
	Total Arus Kas Keluar	329.056.957.552,52	309.635.994.881,04
3	Arus Kas Beralih dari Aktivitas Operasi	62.829.944.493,72	60.013.884.153,47
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
1	Arus Kas Masuk		
	Pendapatan dari Penjualan Investasi Jangka Panjang	-	-
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	-	412.709.850,00
	Total Arus Kas Masuk	-	412.709.850,00
2	Arus Kas Keluar		
	Belanja Modal / Pembangunan	70.187.647.817,93	60.080.485.733,00
	Pembelian Investasi Jangka Panjang	-	-
	Total Arus Kas Keluar	70.187.647.817,93	60.080.485.733,00
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(70.187.647.817,93)	(59.667.775.883,00)

III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
1	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-
	Transfer dari Dana Cadangan	19.036.041.445,00	18.500.000.000,0
	Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-
	Hibah	-	-
	Total Arus Kas Masuk	19.036.041.445,00	18.500.000.000,0
2	Arus Kas Keluar		
	Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi	1.032.398.926,35	2.568.468.483,0
	Transfer Ke Dana Cadangan	-	11.267.142.598,0
	Penyertaan Modal	6.446.041.672,80	8.489.379.793,8
	Pemberian Piutang Daerah	875.000.000,00	-
	Total Arus Kas Keluar	8.353.440.599,15	22.324.990.874,8
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	10.682.600.845,85	(3.824.990.874,8)
	KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	3.324.897.521,64	(3.478.882.604,3)
	SALDO AWAL KAS	73.659.073.376,51	77.137.955.980,8
	SALDO AKHIR KAS	76.983.970.898,15	73.659.073.376,5

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1385

3209/54

Membaca Surat : Dari Dekan F. E - UAJ Yogyakarta
Nomor : 303/R/I Tanggal : 02/08/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijijinkan Kepada : Nama : F. R. E. Triastutiningrum NO MHS / NIM : 12910/EA
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Akuntansi - UAJ
Alamat : Jl. Babarsari No.43 Yogyakarta
Penanggungjawab : H. Andre Purwanugraha, SE. MBA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: UPAYA-UPAYA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENERAPKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 09/08/2006 Sampai 09/11/2006
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

F. R. E. Triastutiningrum

Dikeluarkan di : Yogyakarta

pada Tanggal : 09/08/2006

Kepala Dinas Perizinan Kota



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Dinas Instansi Pemkot Yogyakarta (26) terlampir
4. Dekan FE - UAJ Yogyakarta
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1385

~~3209/54~~

Membaca Surat : Dari Dekan F. E - UAJ Yogyakarta
Nomor : 303/R/I Tanggal : 02/08/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Ijinkan Kepada : Nama : F. R. E. Triastutiningrum NO MHS / NIM : 12910/EA
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Akuntansi - UAJ
Alamat : Jl. Babarsari No.43 Yogyakarta
Penanggungjawab : H. Andre Purwanugraha, SE. MBA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: UPAYA-UPAYA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM MENERAPKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Kasi/Responden : Kota Yogyakarta
aktu : 09/08/2006 Sampai 09/11/2006
mpiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
ngan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

F. R. E. Triastutiningrum

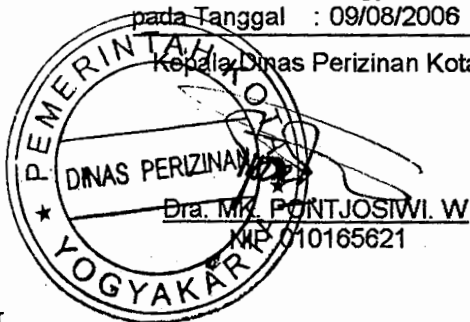
busan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Dinas Instansi Pemkot Yogyakarta (26)terlampir
4. Dekan FE - UAJ Yogyakarta
5. Yang bersangkutan

Dikeluarkan di : Yogyakarta

pada Tanggal : 09/08/2006

Kepala Dinas Perizinan Kota



Dra. M. PONTJOSIWI. W

NP 010165621